



Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022

Adinda Moreta, Zulfa Harirah MS

Universitas Riau, Pekanbaru 28293, Riau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Mei 30, 2023
Revised: July 20, 2022
Available online: September 01, 2023

KEYWORDS

Collaborative Dynamics, Collaborative Actions, Impact and Temporary Adaptation.

CORRESPONDENCE

Name: Zulfa Harirah MS
E-mail: zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Nagari Tuo Pariangan Tourism Village is one of the tourism areas in Tanah Datar Regency which has been affected by the COVID-19 pandemic. Interestingly, in 2021-2022 it has managed to rise followed by several achievements, namely being in the ADWI 2022 Top 50 category, 1st Place for Developing Tourism Villages and obtaining 2 MURI Records, namely the First Tourism Village with Coffee-Scented Batik and the First Tourism Village with Batik Coloring Experience from Coffee Waste in the ADWI 2022 event. The purpose of this research is to find out how collaborative governance has been carried out so that the Nagari Tuo Pariangan Tourism Village has succeeded in reviving quickly which is studied using the Collaborative Governance Regime (CGR) theory from Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). This research uses a qualitative approach with a descriptive research type and is located in the Nagari Tuo Pariangan Tourism Village. The entire data was obtained through interviews with 17 informants, observations, and documentation which were analyzed using qualitative data analysis stages according to Miles and Huberman. The results of the study show that the dynamics of collaboration have not fully gone well because not all people understand that their area is a tourist destination. Nonetheless, other parties involved have carried out their roles and duties properly which have had an impact on increasing the number of tourist visits and some positive impacts felt by certain communities. The increase in the number of tourist visits must be balanced with the availability of homestays which are currently still limited and given that the majority of tourism revenue comes from guests staying overnight. This is a temporary adaptation which will later be used as a correction for the next collaboration. It can be concluded that collaborative governance in the development of the Nagari Tuo Pariangan Tourism Village has not fully run optimally.

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal akan keindahan alam yang dimilikinya dan sudah diakui oleh mancanegara. Salah satunya adalah Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa terindah di Dunia. Melalui *Budget Travel Magazine*, salah satu majalah pariwisata Internasional dari New York, Amerika Serikat edisi 23 Februari 2012 yang berjudul "World's 16 Most Picturesque Villages", menobatkan Nagari Tuo Pariangan sebagai salah satu Desa Wisata terindah di dunia. Penobatan ini didasarkan pada hasil survei 2000 anket yang diisi oleh wisatawan yang pernah mengunjungi beberapa desa terindah di dunia. Nagari Tuo Pariangan terpilih atas dasar keasrian alam dan warisan leluhur yang masih terjaga.

Mengingat bahwa Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan merupakan salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa dibutuhkan peran berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah, agar kembali menarik perhatian wisatawan untuk mengunjunginya (UU Kepariwisata, 2009).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kepariwisataan menjadi urusan pemerintahan konkuren pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (pasal 12), yang mana urusan pemerintahan terbagi atas 3, yaitu urusan pemerintahan absolut yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang sebagian menjadi kewenangan Pemerintah Pusat jika berada di lintas daerah provinsi atau lintas negara dan sebagian lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan daerah diberikan kewenangan tersendiri atau peluang kemandirian untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya (UU Pemda, 2014).

Mengingat bahwa Nagari Pariangan berbentuk desa, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai kewenangan desa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, salah satunya terdapat pada pasal 18 yang menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU Desa, 2014). Hal ini diikuti dengan pasal 26 tentang Kepala Desa bagian (4) yang menjelaskan bahwa salah satu kewajiban dari Kepala Desa yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dapat dilihat bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa berhak dalam mengelola potensi yang ada di desanya dan segala urusan terkait pengembangan desa menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, mengingat bahwa penyebutan Desa untuk Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan sebutan “Nagari”. Pasal 1 menjelaskan bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Perda Nagari, 2018).

Untuk Kabupaten Tanah Datar, terkait Nagari diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, di mana terdapat bab yang menjelaskan bahwa Nagari dapat melakukan kerja sama terkait peningkatan perekonomian masyarakat Nagari serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (BAB IX Kerja Sama Antar Nagari pasal 127 ayat 2). Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa adanya sikap keterbukaan dari Pemerintah Nagari untuk menjalin hubungan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik yang berada di dalam Nagari maupun di luar Nagari guna mengembangkan potensi yang dimilikinya, terutama di bidang pariwisata.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari di atas, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mencetuskan program unggulan berbasis pariwisata dengan nama “Satu Nagari Satu Event” sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pariwisata masih menjadi permasalahan pembangunan dan masuk ke dalam isu strategis RPJMD 2021-2026 yang harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Program unggulan “Satu Nagari Satu Event” yang diresmikan pada Bulan Februari 2022 menjadi jawaban dari Pemerintah atas permasalahan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar. Untuk tahun 2022, program unggulan “Satu Nagari Satu Event” dilaksanakan di 14 Nagari dan Nagari Tuo Pariangan menjadi salah satu Nagari yang sudah melaksanakan program unggulan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, salah satunya Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan. Terhitung sejak penobatan Nagari Tuo Pariangan sebagai salah satu Desa Terindah di Dunia di tahun 2012, banyak wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan. Akan tetapi, akibat pandemi COVID-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel 1 jumlah pengunjung Nagari Tuo Pariangan berdasarkan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara terhitung tahun 2012-2022 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Nagari Tuo Pariangan Tahun 2012-2022

No.	Tahun	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnu)	Total
1.	2012	693	15.949	16.642
2.	2013	723	16.521	17.244
3.	2014	511	5.651	6.162

<https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>

4.	2015	936	7.253	8.189
5.	2016	1.756	10.634	12.390
6.	2017	1.638	45.760	47.398
7.	2018	1.057	244.334	245.391
8.	2019	406	241.603	242.009
9.	2020	207	41.458	41.665
10.	2021	-	57.211	57.211
11.	2022	546	184.841	185.387

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar 2012-2022

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan terkena dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Di tahun 2021-2022 Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan telah berhasil bangkit kembali, hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Tentunya hal ini juga diikuti dengan peningkatan keterlibatan dari beberapa pihak dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Keterlibatan Pihak dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan

No.	Tahun	Pihak yang Terlibat
1.	2019-2020	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Pemerintah Kecamatan Pariangan, Pemerintah Nagari Tuo Pariangan, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), Tanah Datar <i>Tourism</i> (TDT), Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, dan masyarakat
2.	2021	+ Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pariangan
3.	2022	+ ASTRA

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara data jumlah kunjungan wisatawan dengan *collaborative governance*. Hubungannya adalah pada tahun 2021 Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan telah berhasil bangkit dari pandemi COVID-19 yang terlihat pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini diikuti dengan kembali aktifnya kelembagaan POKDARWIS yang sebelumnya tidak berfungsi. Bahkan, di tahun 2021, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar menerbitkan Surat Keterangan (SK) POKDARWIS Nomor: 556/020/SK/PARPORA/2021 tentang Pengukuhan POKDARWIS Pariangan. Dan di tahun 2022, Nagari Tuo Pariangan berhasil masuk kategori 50 Besar Desa Wisata ADWI 2022 yang berdampak pada adanya kerja sama bersama ASTRA selaku mitra dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (Kemenparekraf, 2011). Hal ini diikuti dengan beberapa prestasi yang diperoleh Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Oktober 2022 lalu, yaitu Juara 1 Desa Wisata Berkembang dan memperoleh 2 Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yaitu Desa Wisata Pertama dengan Batik Beraroma Kopi dan Desa Wisata Pertama yang Memiliki Pewarna Batik Alami dari Limbah Kopi dalam ajang ADWI 2022.

Dengan beberapa penghargaan di atas, menandakan bahwa adanya kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terlibat

dalam menyukseskan keberhasilan tersebut. Perspektif *Collaborative Governance* dianggap tepat dalam menganalisis pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan. Hal ini dikarenakan konsep *Collaborative Governance* dapat melihat kolaborasi atau kerja sama yang dijalin antar pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan. Selanjutnya, penulis memilih teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) yang disebut *Collaborative Governance Regime* (CGR) untuk menganalisis lebih lanjut terkait pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan., *Collaborative Governance Regime* (CGR) secara rinci melihat bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak serta adaptasi sementara atas tindakan tersebut.

Terlepas dari adanya kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan, berdasarkan survei analisis yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui situs [Jadesta \(2022\)](#), terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan masih memerlukan perbaikan. Aspek tersebut dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu Atraksi (Daya Tarik), Amenitas (Fasilitas Pendukung), dan SDM serta Masyarakat. Untuk kriteria Atraksi, terdapat beberapa aspek yang tergolong kurang terpenuhi, yaitu paket wisata yang tersedia, pengembangan produk wisata terintegrasi belum diimplementasikan, dan dampak serta manfaat ekonomi dan atraksi wisata sudah ada namun hanya untuk beberapa orang saja. Untuk kriteria Amenitas, fasilitas lahan parkir dan fasilitas tempat penjualan cenderamata masih terbatas. Terakhir, untuk kriteria SDM dan Masyarakat, sikap keterbukaan masyarakat masih tergolong kurang terpenuhi.

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, pertama, penelitian yang dilakukan oleh [Deden Saputra \(2020\)](#) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul “Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kampung taman sari dari segi tatakelola kolaborasinya dengan melihat kendala yang ada dalam proses kerja samanya yang dianalisis menggunakan teori *Collaboartive Governance* menurut [Ansell & Gash \(2007\)](#). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh [Selamet Joko Utomo dan Bondan Satriawan \(2017\)](#) Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2017 dengan judul “Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang” yang bertujuan untuk untuk merumuskan rencana strategis pengembangan desa wisata di Kecamatan Karangploso yang dianalisis menggunakan analisis strategi SWOT. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh [Cintantya Andhita Dara Kirana dan Rike Anggun Artis \(2020\)](#) Politeknik STIA LAN Bandung pada tahun 2020 dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu” yang bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di Kota Batu, dianalisis menggunakan konsep pembangunan berbasis *Collaborative Governance Planning*. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh [Ardhia Mafaza dan Kristina Setyowati \(2020\)](#) FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata” yang bertujuan

untuk mengidentifikasi adanya proses *Collaborative Governance* dalam program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang yang dianalisis menggunakan 8 indikator kolaborasi *De Save*. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh [Lice Sari \(2021\)](#), Universitas Pelita Harapan dan Nova Irene Bernedeta Sitorus, Universitas Pradita pada tahun 2021 dengan judul “Kolaborasi *Stakeholder* Pariwisata dalam Pengelolaan Akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta di Masa Pandemi COVID-19” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan antar stakeholder dalam pengelolaan akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta pada masa pandemi COVID-19 yang dianalisis menggunakan konsep akomodasi pariwisata. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh [Philianto Dani Rahu \(2020\)](#) dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan pada tahun 2021 dengan judul “Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya” yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana optimasi Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Pengembangan Wisata Sei Gohong Desa, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya selain dari lokasi dan teori yang digunakan terletak pada adanya kelembagaan yang dibina langsung oleh pemerintah desa setempat dan belum dibentuk oleh desa wisata lainnya. Dalam hal ini, terdapat Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang pembinaannya dilakukan langsung oleh Pemerintah Nagari Tuo Pariangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek. Dan jika kembali merujuk pada jumlah pengunjung Nagari Tuo Pariangan di masa pandemi COVID-19, dari tahun ke tahun telah menunjukkan adanya peningkatan yang menandakan bahwa Nagari Pariangan memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki cikal bakal di kemudian hari untuk menjadi salah satu pariwisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik lagi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan agar potensi pariwisata yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penelusuran lebih lanjut mengenai kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam mengembangkan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan agar tetap menarik wisatawan meskipun sedang berada di masa pandemi COVID-19 terhitung pada tahun 2021-2022. Untuk itu, penelitian ini diberi judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia ([Syahza, 2015](#)). Prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati ([Siyoto & Sodik, 2015](#)), sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada ([Syarif & Yunus, 2013](#)). Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah terkait *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021-2022. Keseluruhan data

diperoleh melalui 3 metode pengumpulan data. Pertama, wawancara informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah 17 orang, yaitu dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar 2 orang, Pemerintah Kecamatan Pariangan 1 orang, Pemerintah Nagari Tuo Pariangan 2 orang, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pariangan 2 orang, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Pariangan 1 orang, komunitas Tanah Datar Tourism (TDT) 1 orang, masyarakat Nagari Tuo Pariangan 4 orang, pengunjung 3 orang, dan Pemerintah Nagari Pandai Sikek 1 orang selaku pihak luar untuk menguji keabsahan data. Kedua, observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini objeknya Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan. Penulis melakukan pengamatan mengenai dampak yang dihasilkan dari kolaborasi yang dilakukan. Ketiga, dokumentasi yang diperoleh dari sumber yang tersedia, seperti dokumentasi kerja sama. Kemudian, data ini dianalisis menggunakan tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan proses pemilihan dan penyeleksian data, menyajikan data dalam bentuk uraian singkat maupun tabel, dan terakhir menyimpulkan data yang sudah disajikan.

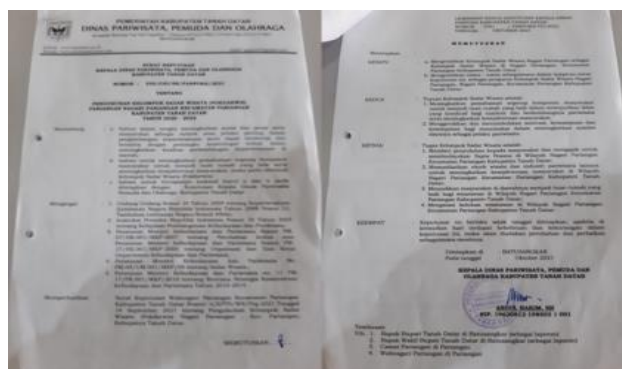
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan adanya peningkatan. Terutama, dari segi kunjungan wisatawan dan peningkatan kerja sama. Hal ini menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut menggunakan teori *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) dengan 3 indikator antara lain sebagai berikut :

Dinamika Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022

Dinamika kolaborasi merupakan tahapan awal dalam proses kolaborasi atau diartikan sebagai bentuk perjuangan menggerakkan berbagai pihak agar berkolaborasi. Dalam dinamika kolaborasi, terjadi perubahan yang selalu bergerak dinamis karena adanya dorongan dari berbagai pihak yang diawali dengan penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama hingga menghasilkan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Pada dinamika kolaborasi, yang menjadi penggerak utama (*drivers*) proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021-2022 adalah Pemerintah Nagari, yaitu Kepala Nagari Tuo Pariangan. Hal ini dikarenakan Nagari memiliki otonomi tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta dalam hal mengelola potensi yang dimilikinya (pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintah Nagari mengawalinya dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pariangan dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) (Wardana, 2018). Hal ini secara langsung berpengaruh dengan terjalannya kerja sama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, selaku dinas yang difungsikan secara khusus untuk mengelola kepariwisataan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kecamatan, selaku Pemerintah setingkat di atas Nagari yang ditandai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Tanah Datar terhadap pembentukan POKDARWIS dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. SK Pembentukan POKDARWIS Pariangan
Sumber: POKDARWIS Pariangan 2021

Selanjutnya diikuti dengan terjalannya kerja sama dengan Komunitas Tanah Datar *Tourism* (TDT), Sekolah Tinggi Pariwisata (STP Bandung), ASTRA selaku mitra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perguruan tinggi sekitar, seperti Universitas Andalas (UNAND), Universitas Negeri Padang (UNP), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus, Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, masyarakat Nagari Tuo Pariangan, dan pengunjung terutama turis mancanegara. Berikut ini ditampilkan salah satu gambar yang menunjukkan kesepakatan bersama.



Gambar 2. Nota Kesepakatan (MoU) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung
Sumber: Internet (tanahdatar.go.id) 2020

Adapun yang menjadi hambatan selama dinamika kolaborasi dilakukan, yaitu terkait pemahaman masyarakat akan adanya kunjungan yang masih dikatakan belum maksimal. Hanya beberapa dari masyarakat saja yang sudah paham bahwa daerahnya adalah destinasi wisata sehingga ramai dikunjungi oleh wisatawan. Setelah diketahui siapa saja pihak yang terlibat, keseluruhan pihak ini saling berkomunikasi dan bertukar ide maupun pengetahuan yang dimilikinya masing-masing. Meskipun tidak keseluruhan komunikasi dilakukan secara *offline*, dimana STP Bandung dan ASTRA tidak berdomisili di Kabupaten Tanah Datar, hal ini tidak memudarkan komitmen dari masing-masing pihak. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi, maka diperoleh beberapa kesepakatan dan ketetapan bersama, seperti pengadaan pertemuan rutin tiap bulannya yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah

Datar, Pemerintah Kecamatan Pariangan, Pemerintah Nagari Tuo Pariangan, dan POKDARWIS Pariangan yang diikuti dengan agenda pelaporan kinerja, anggaran serta jumlah kunjungan wisatawan setiap bulannya.

Keseluruhan proses ini diperkuat dengan diterbitkannya beberapa landasan, seperti Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, dan SK POKDARWIS Nomor : 556/020/SK/PARPORA/2021 tentang Pengukuhan POKDARWIS Pariangan. Dapat dikatakan bahwa dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan pada komponen pemahaman bersama terdapat satu pihak yang belum bisa memberikan kontribusinya dengan baik, yaitu masyarakat Nagari Tuo Pariangan. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian bersama dalam kolaborasi.

Tindakan-Tindakan Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022

Tindakan-tindakan kolaborasi menjadi tahapan inti dalam proses kolaborasi. Pada tahapan ini berbagai pihak yang terlibat saling bekerja sama dalam menjalankan perannya guna pencapaian tujuan bersama. Dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021-2022, tindakan-tindakan kolaborasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Bentuk Kolaborasi Antar Pihak yang Terlibat

No.	Pihak yang Terlibat	Bentuk Kolaborasi
1.	Pemerintah Nagari Tuo Pariangan dan POKDARWIS	Pemerintah Nagari membentuk dan menyediakan anggaran pelatihan POKDARWIS. Sedangkan POKDARWIS bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata di Nagari Tuo Pariangan
2.	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Kecamatan Pariangan	Bersama-sama melakukan pembinaan dan pelatihan serta pengawasan terhadap POKDARWIS
3.	ASTRA bersama BUMNAG terhadap POKDARWIS	ASTRA memunculkan minat dan bakat masyarakat, seperti pembuatan cenderamata. Kemudian, dialihkan kepada BUMNAG selaku pihak yang memfasilitasi unit usaha masyarakat. Dari sebagian hasil unit usaha ini nantinya dijadikan sebagai tambahan pembelian kebutuhan <i>homestay</i> bagi POKDARWIS
4.	Tanah Datar <i>Tourism</i> (TDT) bersama POKDARWIS	TDT melakukan pembinaan dan membantu POKDARWIS dalam melaksanakan <i>event</i>

		kenagarian serta mempromosikannya
5.	Perguruan tinggi dan POKDARWIS	POKDARWIS memfasilitasi kunjungan dari berbagai perguruan tinggi, dan perguruan tinggi membantu pembuatan <i>website</i> POKDARWIS bahkan STP Bandung memberikan beasiswa kepada anak-anak Nagari Tuo Pariangan
6.	Turis Mancanegara dan masyarakat	Turis mengajarkan masyarakat berbahasa Inggris. Sedangkan, masyarakat mengajarkan turis bermain kesenian Nagari Tuo Pariangan, seperti <i>bansi</i>

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan memiliki keterlibatan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Tidak hanya dari kalangan Pemerintah, tetapi juga terdapat kalangan swasta, akademisi, dan komunitas yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan hingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan Nagari Tuo Pariangan di tahun 2021-2022. Tabel di atas diikuti dengan beberapa dokumentasi yang menunjukkan bentuk kolaborasi pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. Kunjungan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar untuk meninjau persiapan Nagari Tuo Pariangan sebelum penilaian 50 Besar Desa Wisata ADWI 2022 di beberapa lokasi wisata sejarah, budaya, dan sentra batik Pariangan.

Sumber: Instagram (@parpora.td) 2020

Dampak serta Adaptasi Sementara dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022

Secara keseluruhan, kolaborasi yang dilakukan sudah membawa perubahan-perubahan serta kemajuan dalam berbagai bidang, namun hanya dirasakan oleh beberapa pihak saja. Untuk dampak yang berbentuk data berupa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan terhitung tahun 2021-2022. Pada tahun 2020 terjadi penurunan

jumlah kunjungan wisatawan akibat pandemi COVID-19, yaitu berjumlah 41.665 orang. Hal ini direspon cepat oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar beserta Pemerintah Kecamatan Pariangan dan Pemerintah Nagari Tuo Pariangan untuk melakukan upaya pergerakan dengan melibatkan berbagai pihak yang berdampak pada adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yaitu berjumlah 57.211 orang dan di tahun 2022 berjumlah 185.387 orang pada tahun 2021.

Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, namun belum berdampak pada masyarakat umum dan hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat saja. Salah satunya pada masyarakat yang memiliki lahan khusus untuk pendirian kedai kawa daun seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Kedai Kawa Daun Tanjung Indah
 Sumber: Instagram (@kawadaun.tanjungindah) 2021

Hal ini menandakan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, terlepas dari berbagai dampak positif yang dihasilkan. Adapun dampak kolaborasi yang sudah dirasakan oleh beberapa pihak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Dampak Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022

No.	Pihak	Dampak yang dirasakan
1.	Beberapa masyarakat Nagari Tuo Pariangan	Beberapa masyarakat menjadi lebih terbuka dalam menerima kunjungan wisatawan dengan baik, meningkatkan pengetahuan dan perekonomian berupa pendirian kedai kawa daun
2.	POKDARWIS Pariangan	Keanggotaan menjadi lebih aktif dan memahami tata cara pengelolaan kegiatan pariwisata, serta adanya website POKDARWIS
3.	Pemerintah Nagari Tuo Pariangan	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, adanya peta digital, dan tambahan dana pembelian kebutuhan <i>homestay</i>

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Dari dampak tersebut menghasilkan adaptasi sementara. Dikatakan sementara karena adaptasi ini hanya dihasilkan selama proses kolaborasi berlangsung dan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi bagi proses

kolaborasi ke depannya. Adaptasi sementara dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan terkait pendirian *homestay* di rumah masyarakat yang harus ditingkatkan. Hal ini merujuk pada pendapatan pariwisata yang hanya berasal dari kunjungan tamu yang menginap dengan total penginapan di tahun 2022 sebesar Rp32.080.000. Sementara, ketersediaan *homestay* saat ini berjumlah 6 *homestay*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. *Homestay* di Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan Tahun 2022

No.	<i>Homestay</i> yang Tersedia
1.	Rumah Gadang Datuak Paduko
2.	Rumah Gadang Angku Bandaharo
3.	Rumah Gadang Inyiak
4.	<i>Homestay</i> Umega
5.	<i>Homestay</i> Nabila
6.	Dangau Minang Maimbau

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Jumlah *homestay* yang tersedia tentunya tidak sebanding dengan jumlah kunjungan wisatawan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan drastis. Upaya peningkatan *homestay* harus diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai dan dana yang mencukupi. Hal inilah yang dikatakan sebagai adaptasi sementara atas dampak yang dihasilkan dari kolaborasi yang dijalankan, karena adaptasi sementara ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kolaborasi selanjutnya.

KESIMPULAN

Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan memiliki keunggulan tersendiri yang membedakannya dengan desa wisata lainnya yang diikuti dengan beberapa pencapaian serta prestasi yang diperoleh di tahun 2022. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari adanya kerja sama yang dijalin dengan beberapa pihak. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan antara lain Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kecamatan Pariangan, Pemerintah Nagari Tuo Pariangan, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pariangan, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Pariangan, Komunitas Tanah Datar *Tourism* (TDT), Sekolah Tinggi Pariwisata (STP Bandung), ASTRA selaku mitra Kemenparekraf, perguruan tinggi sekitar, seperti Universitas Andalas (UNAND), Universitas Negeri Padang (UNP), Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus, masyarakat Nagari Tuo Pariangan, dan pengunjung.

Pada dinamika kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021-2022 belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan tidak seluruh masyarakat Nagari Tuo Pariangan memahami bahwa daerahnya adalah destinasi wisata yang ramai oleh wisatawan. Hal inilah yang masih menjadi hambatan dan PR tersendiri bagi Pemerintah setempat. Dari dinamika ini menghasilkan tindakan-tindakan kolaborasi, dimana keseluruhan tindakan sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat mengenai perannya dalam berkolaborasi. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi saling berkoordinasi antara satu sama lain. Dari tindakan kolaborasi menghasilkan *output* berupa

dampak serta adaptasi sementara. Kolaborasi yang dilakukan sudah membawa berbagai dampak positif, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tertentu saja. Hal ini menandakan bahwa kolaborasi yang dilakukan belum sepenuhnya membuahkan hasil baik yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari dampak ini menghasilkan adaptasi sementara berupa peningkatan penyediaan *homestay*, mengingat pendapatan pariwisata di Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan hanya bersumber dari adanya kunjungan tamu yang menginap. Tentunya penyediaan *homestay* harus mempertimbangkan keterbatasan lahan yang tersedia. Hal inilah yang nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kolaborasi selanjutnya.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Jadesta. (2022). *Analisis Pariangan Desa Terindah Di Dunia*. Jadesta Kemenparekraf. Retrieved July 25, 2022, <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/survei/54088>
- Kemenparekraf. (2011). *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata*. JDIIH Kemenparekraf. Retrieved August 1, 2022, https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/regulation_subject_1593768111_km18hm001mkp2011.pdf
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/3119/2501>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.46730/JKP.11.1.P.7-12>
- Rahu, P. D., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.37304/JISPAR.V10I1.2286>
- Perda Nagari. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*. Retrieved August 4, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99639/perda-prov-sumatera-barat-no-7-tahun-2018>
- UU Kepariwisata (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Retrieved July 25, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- UU Pemda. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved July 25, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- UU Desa. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Retrieved July 25, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/10741>
- Sari, L., Irene, N., & Sitorus, B. (2021). Kolaborasi Stakeholder Pariwisata dalam Pengelolaan Akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9). <https://doi.org/10.36418/JISS.V2I9.403>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing.
- Syahza, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
- Syarif, S., & Yunus, F. M. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Utomo, S. J., & Satriawan, B. (2017). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Neo-Bis*, 11(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/300043074.pdf>
- Wardana, A. (2018). Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Pariwisata Nagari Tuo Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1). Retrieved August 1, 2022, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/17559>